



Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara

Anggi Luthfiah Pane^{1*}, Nurlaila Rachman², Triana³

^{1,2,3}, Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*korespondensi Penulis : anggilutthh2004@gmail.com

Abstract: *The study tested tax literacy and factors that influenced tax compliance in Binjai City, North Sumatra, using a qualitative approach of semi-structured interviews and observations. The results show that the majority of people have a basic understanding of tax types, but difficulties in understanding technical details such as tax calculations and reporting processes. Factors such as education, income, and tax administration experience affect tax literacy, while awareness of the importance of tax for development still needs to be enhanced. The implications of this research include recommendations to develop inclusive and tailor-made tax education programmes, to enhance public understanding and compliance in paying taxes and to support national development effectively. This research makes an important contribution to local tax policy in an effort to increase public participation and awareness of their tax obligations.*

Keywords: *Tax knowledge, Tax compliance, Tax literacy*

Abstrak : Penelitian ini menguji literasi pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara semi-terstruktur dan observasi. Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang jenis-jenis pajak, namun kesulitan dalam memahami detail teknis seperti perhitungan pajak dan proses pelaporan. Faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan pengalaman administrasi perpajakan mempengaruhi literasi pajak, sementara kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan masih perlu ditingkatkan. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk mengembangkan program edukasi pajak yang inklusif dan disesuaikan, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta mendukung pembangunan nasional secara efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi kebijakan perpajakan lokal dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak, Literasi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk membiayai berbagai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program sosial lainnya. Dalam konteks pembangunan nasional, pajak berperan penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sangat penting untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk berbagai program pembangunan tersebut. Namun, di banyak daerah, tingkat literasi pajak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Sangat sulit untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan

seseorang untuk membaca dan memahami informasi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bermanfaat sepanjang hidup. Dengan kata lain, literasi pajak berkaitan dengan semua pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak, serta cara wajib pajak menerapkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, literasi merupakan salah satu opsi untuk membangun masyarakat yang sadar pajak

Literasi pajak adalah kemampuan individu untuk memahami informasi dan konsep yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk peraturan, prosedur, dan kewajiban dalam membayar pajak. Literasi pajak juga mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan umum. Tingkat literasi pajak yang rendah dapat mengakibatkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target penerimaan negara dan berdampak negatif pada pembangunan.

Kota Binjai, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, adalah sebuah kota dengan dinamika sosial dan ekonomi yang beragam. Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, Binjai memiliki populasi yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Keberagaman ini mempengaruhi tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian mengenai tingkat literasi pajak di kalangan masyarakat Kota Binjai menjadi sangat penting.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat literasi pajak di Kota Binjai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam perumusan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan perpajakan di Kota Binjai. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi otoritas perpajakan dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan program edukasi yang lebih efektif dan inklusif, yang dapat diterapkan tidak hanya di Kota Binjai, tetapi juga di daerah lain yang ada di Indonesia.

Dengan meningkatnya literasi pajak di masyarakat, diharapkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga akan meningkat, sehingga kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, peningkatan kepatuhan perpajakan akan berdampak positif pada penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya relevan bagi Kota Binjai, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi upaya peningkatan literasi dan kepatuhan pajak di seluruh Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengetahuan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui atau dipahami mengenai suatu hal (mata pelajaran). Pemahaman perpajakan meliputi pemahaman tentang dasar-dasar perpajakan serta berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, dan persyaratan pelaporannya.

Pengetahuan pajak merupakan komponen penting dari sistem perpajakan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan WP tentang pajak. Pengetahuan pajak dapat membantu WP membuat keputusan sendiri tentang jenis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang mereka butuhkan. Dengan demikian, WP harus memiliki pengetahuan kontekstual yang mencakup pengetahuan hukum dan prosedur untuk memahami proses perpajakan dan tanggung jawabnya untuk mematuhi hukum perpajakan di negara tempat mereka dikenakan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, seperti menghitung pajak penghasilan yang terutang dan melaporkan SPT PPh dengan benar. Karena pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara untuk memajukan negara, mereka yang bertanggung jawab atas pajak sangat memahami dasar perpajakan dan selalu mengetahui perubahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah aturan yang dibuat untuk memberi tahu wajib pajak tentang pentingnya pajak negara. Kepatuhan pendaftaran mereka, surat-surat yang memberitahu mereka tentang deposit ulang, perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dibayarkan, dan pembayaran dan penundaan adalah indikatornya. Kemampuan orang pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan persyaratan hukum dengan cara yang memadai dan dapat diterima disebut kepatuhan pajak. Kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, pematuhan pelaporan, kepadatan perhitungan pajak dan keakuratan pajak adalah semua indikator kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak adalah keinginan seorang pemungut pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa takut inspeksi, penyelidikan, peringatan, atau ancaman, atau penetapan sanksi administratif atau hukum. mengatakan bahwa kepatuhan pajak terdiri dari dua jenis: kepatuhan formal dan material. Wajib pajak yang patuh berarti mereka sadar akan pajak, memahami hak dan kewajiban pajak, dan diharapkan dapat peduli dengan pajak, yaitu mampu melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan cara yang tepat dan efisien.

Dalam kepatuhan wajib pajak, wajib pajak memiliki hak untuk membayar pajak dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT tepat waktu, dan membayar wajib pajak tepat waktu adalah tanda kepatuhan wajib pajak.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa literasi mencakup kemampuan untuk membaca dan menulis dengan benar, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, dan kemampuan untuk mengolah data. Oleh karena itu, literasi sadar pajak adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak dan membuat mereka menjadi orang yang bijaksana dan taat pajak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi literasi pajak meliputi pendidikan, usia, pendapatan, dan pengalaman dalam berurusan dengan administrasi perpajakan. Pendidikan formal memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi pajak karena menyediakan dasar pengetahuan tentang konsep-konsep ekonomi dan perpajakan. Selain itu, program edukasi pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat.

4. Hubungan antara Literasi Pajak dan Kepatuhan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Mansur et al. (2022) menemukan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran pajak, dan tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM di KPP Jambi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran pajak, dan tarif pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM.

Studi Wulandari dan Fitria (2021) menemukan bahwa lebih banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, semakin mereka sukarela melakukannya. Jika wajib pajak mengetahui dan memahami semua peraturan dan ketentuan yang terkait dengan kewajibannya, mereka akan dengan sukarela dan tanpa tekanan melaksanakan kewajibannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data mengenai tingkat literasi terkait kewajiban pembayaran pajak pada masyarakat Kota Binjai, Sumatera Utara. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memungkinkan peneliti mendapatkan informasi mendalam tentang pengetahuan dan pengalaman masyarakat terkait perpajakan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, termasuk wajib pajak individu dari berbagai latar belakang, pejabat atau staf di

kantor pajak setempat, serta pakar atau konsultan pajak. Proses wawancara melibatkan penjadwalan dengan informan terpilih, pelaksanaan wawancara yang direkam dan dicatat, serta analisis data melalui transkripsi dan pengkodean untuk mengidentifikasi tema utama yang terkait dengan literasi dan kepatuhan pajak.

Selain wawancara, observasi partisipatif dan non-partisipatif juga dilakukan di beberapa lokasi strategis seperti kantor pajak, tempat umum, dan acara sosialisasi pajak. Observasi ini bertujuan untuk mengamati interaksi, perilaku, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan. Data dari observasi dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pola interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak, serta respon masyarakat terhadap sosialisasi pajak. Integrasi data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan temuan dari wawancara dan observasi, guna meningkatkan validitas hasil penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di Kota Binjai. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di masyarakat.

HASIL

1. Tingkat Literasi Pajak di Kota Binjai

Penelitian ini mengungkap bahwa literasi pajak di Kota Binjai menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam di kalangan masyarakat. Mayoritas responden menunjukkan pemahaman dasar tentang jenis-jenis pajak yang ada dan kewajiban dasar dalam membayar pajak. Mereka menyadari adanya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan beberapa pajak daerah yang berlaku di daerah mereka. Namun, ketika ditanya tentang detail prosedur perpajakan, seperti cara menghitung pajak yang terutang atau proses pengisian dan pelaporan SPT, sebagian besar responden mengakui bahwa mereka kurang memahami secara mendalam. Banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam menjelaskan proses-proses teknis ini dengan jelas, menunjukkan bahwa literasi pajak masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik dalam membayar pajak.

Selain itu, terlihat perbedaan tingkat literasi antara responden dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, responden dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan. Mereka dapat

menjelaskan lebih detail tentang perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak konsumsi, serta mengenai berbagai keringanan pajak yang mungkin mereka dapatkan. Sementara itu, responden dengan latar belakang pendidikan rendah atau hanya memiliki pendidikan dasar lebih cenderung mengandalkan pengetahuan lisan atau informasi yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dengan demikian, peningkatan literasi pajak di Kota Binjai tidak hanya memerlukan upaya untuk menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami, tetapi juga pendekatan yang lebih inklusif untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Program-program edukasi pajak yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan dan pengetahuan akan menjadi kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Pajak

Faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan pengalaman berurusan dengan administrasi perpajakan telah terbukti mempengaruhi tingkat literasi pajak di Kota Binjai. Responden dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep perpajakan dan aturan-aturan yang berlaku. Mereka dapat dengan lebih percaya diri menjelaskan tentang tarif pajak yang berlaku, prosedur pelaporan pajak yang benar, dan manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan nasional.

Di sisi lain, responden dengan pendapatan rendah atau yang kurang berpengalaman dalam urusan perpajakan sering menghadapi kesulitan dalam memahami detail-detail teknis perpajakan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang cukup untuk informasi atau tidak mampu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terus berubah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan literasi pajak harus mempertimbangkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga dapat memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik.

3. Pemahaman tentang Pentingnya Pajak bagi Pembangunan

Meskipun sebagian besar responden menyatakan kesadaran akan pentingnya pajak untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan program-program sosial, pemahaman konkret mengenai mekanisme dan manfaat pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak responden menganggap pajak sebagai beban atau kewajiban semata, tanpa memahami sepenuhnya bagaimana dana pajak digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan pemahaman ini dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak, karena mereka akan lebih menyadari dampak positif dari kewajiban perpajakan yang mereka laksanakan. Dengan demikian, program sosialisasi dan edukasi pajak perlu difokuskan tidak hanya pada menjelaskan aturan-aturan perpajakan, tetapi juga mengkomunikasikan secara efektif mengenai kontribusi pajak dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan secara komprehensif mengenai literasi pajak dan kepatuhan perpajakan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak di Kota Binjai masih bervariasi, dengan mayoritas responden memiliki pemahaman dasar tentang jenis-jenis pajak yang berlaku, namun memiliki keterbatasan dalam pemahaman detail mengenai prosedur perpajakan yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan literasi pajak guna memastikan kesadaran dan kepatuhan yang lebih baik dalam membayar pajak.

Pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan literasi pajak, dengan responden berpendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep perpajakan. Di sisi lain, responden dengan latar belakang pendidikan rendah atau pendapatan rendah sering mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis perpajakan. Oleh karena itu, pendekatan edukasi pajak yang lebih inklusif, yang mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat, perlu diterapkan untuk mencapai peningkatan literasi yang merata di Kota Binjai.

Pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Meskipun sebagian besar responden menyadari bahwa pajak mendukung pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengkomunikasikan manfaat konkrit dari kewajiban perpajakan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong motivasi untuk patuh dalam membayar pajak, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan penerimaan negara untuk pembangunan yang lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di Kota Binjai. Implementasi program edukasi yang berkelanjutan, disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat

setempat, menjadi kunci dalam memastikan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memiliki implikasi yang luas bagi upaya serupa di daerah-daerah lain di Indonesia, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui pemanfaatan sumber daya pajak yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR REFERENSI

- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax literacy in the digital economy. Retrieved from https://ujcontent.uj.ac.za/esploro/outputs/conferencePaper/Tax-literacy-in-the-digital-economy/999783907691?skipUsageReporting=true&recordUsage=false&institution=27UOJ_INST
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Aryan, D. (2021). Tingkat literasi pajak penghasilan orang pribadi dan determinannya (studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). *Sebatik*, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7). Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4107>
- Yuliaty, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>